KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menanti Kiprah Wajah Baru Wakil Rakyat
Tanggal : Kamis, 05 September 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Menanti Kiprah Wajah Baru Wakil Rakyat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 575 nama anggota DPR RI terpilih yang akan duduk di Senayan dalam lima tahun mendatang. Kemunculan banyak wajah baru memancarkan harapan ada perbaikan kinerja para wakil rakyat.

Berdasarkan data KPU, hampir 50% kursi DPR diisi wajah-wajah baru atau tepatnya 286 orang (49,74%) dari 575. Selama ini kinerja wakil rakyat di Senayan selalu menjadi sorotan publik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menilai kinerja DPR periode 2014-2019 merupakan yang terburuk sejak era Reformasi. Satu di antara indikatornya adalah minimnya produk legislasi dan tingkat kehadiran yang sangat buruk.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, pada dasarnya masyarakat sangat menaruh harapan tinggi terhadap para wakil rakyat baru periode lima tahun mendatang. Namun, optimisme juga harus ada alasan. Berkaca pada pengalaman periode sebelumnya, banyak anggota baru tidak menjadi jaminan akan membaiknya performa kerja DPR. "Saya tidak yakin antara yang lama dan yang baru bersinergi. Artinya yang lama berpengalaman dan yang baru-baru mau belajar. Saya melihatnya adalah kemungkinan besar yang baru ini akan berbaur dengan mereka yang lama yang sudah menjadi 'pemain' terlebih dahulu. Saya berkeyakinan tak akan mengubah wajah baru DPR," ungkap Ujang kemarin.

Alasannya, anggota DPR baru dinilai masih miskin pengalaman. Kedua, biasanya setelah mereka menjabat justru akan membaur dengan budaya lama, terutama dalam permainan anggaran di DPR sehingga sektor legislasi dan pengawasan kerapkali dilupakan. "Wajah-wajah baru yang dulunya ideal, memiliki visi misi dan program yang baik untuk kerakyatan, justru ketika sudah bergabung, sudah jadi, sudah menikmati berbagai fasilitas, lupa dengan agenda awal mereka yang ideal is sehingga fungsi dan kewenangan yang tiga itu ketika sudah duduk dan dilantik itu dikesampingkan," urainya.

Tiga kewenangan yang dimiliki baik soal penganggaran, legislasi, dan pengawasan kerapkali bukan dimanfaatkan untuk memajukan DPR, tapi justru lebih untuk kepentingan sediri, kelompok, dan partai politiknya.

"Kita berkaca pada periode yang lalu, bagaimana wajah baru ketika itu banyak juga, tapi persoalannya tak mengubah wajah DPR juga. Karena fungsi legislasi, pengawasan dan *budgeting* itu bukan didorong untuk menguatkan atau membangun wajah DPR yang modern yang bagus, tetapi lebih pada digunakan dimanfaatkan keuntungan baik yang sifatnya pribadi, kelompok, maupun golongan untuk mengembalikan modal politik yang sudah keluar banyak itu," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebenarnya orientasi kinerja DPR bukan sebagai pabrik dari undang-undang (UU). Artinya, bukan seberapa banyak UU yang dihasilkan, tapi apakah UU yang dihasilkan itu dibutuhkan masyarakat atau tidak. "Kadang-kadang terlalu banyak undang-undang dan peraturan itu berbahaya. Misalnya orang pakai sepatu pun diatur warnanya apa. Jadi di negara-negara yang sudah *establish* (mapan) undang-undang mereka tak lagi membuat. Paling melakukan revisi-revisi, penyesuaian terhadap keadaan, dan sebagainya. Jadi memang undang-undang yang diperlukanlah yang dibuat," katanya.

Terkait minim kehadiran anggota DPR selama ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa di seluruh dunia soal kehadiran DPR itu yang terpenting adalah kuorum. "Jangan pernah berharap ada 560 anggota itu semua hadir. Oleh karena itu, dibuat aturan kuorum setengah plus 1. *Kan* ada yang tugas di luar kota, ada yang di luar daerah, ada yang di luar negeri, ada konferensi, dan lain-lain. Jadi yang penting itu kuorumnya itu. Jadi saya kira cara pandang terhadap parlemen itu yang salah, termasuk institusi yang mengamati parlemen, tapi tak mengerti cara kerjanya parlemen," tuturnya.

Mengenai jumlah anggota DPR ke depan yang hampir 50% baru, Fadli Zon mengatakan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang berangkat dari berbagai macam organisasi dari bawah.

"Kita berharap lebih berkualitaslah *ya*, tapi dengan sistem yang ada sekarang agak sulit kita berharap terlalu banyak karena akhirnya hanya orang-orang yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, modal, yang lolos. Masih banyak aktivis, akademia, yang tidak lolos hanya karena masalah logistik," pungkasnya.

● abdul rochim

HARAPAN BARU Sebanyak 575 kursi DPR RI telah terpenuhi. Para wakil rakyat terpilih pun siap melaksanakan amanah sebagai penyambung aspirasi warga negara di bidang legislasi, pengawasan, maupun pengelolaan anggaran.

